

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN DALAM OPTIMALISASI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN (Studi di Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan)



Oleh: Maharani Adi Cahyadi

Government

Dibuat: 2006-01-09 , dengan 3 file(s).

Keywords: KEBIJAKAN PEMERINTAH, OPTIMALISASI, TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

Dalam melaksanakan pembangunan, sumber daya alam merupakan hal yang sangat penting sebagai modal dasar pembangunan. Salah satunya adalah lautan, dengan hasil ikan dan udang, daerah ini sangat produktif untuk meningkatkan ekonomi. Namun, dalam memanfaatkan sumber daya alam ini kurang mendapat perhatian dari pihak pemerintah dengan kebijakannya, sehingga akan berdampak kepada kehidupan nelayan. Nelayan yang sumber kehidupannya dari laut, dengan alat yang masih sederhana, pendapatan nelayan masih tercatat dalam kelompok pendapatan yang terendah sehingga masih banyak kehidupan nelayan yang hidup dalam kemiskinan. Kebijakan pemerintah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan melindungi kegiatan para nelayan sebenarnya sudah ada, namun masih mengalami berbagai masalah. Hal ini bisa disebabkan karena kebijakannya yang kurang efektif atau Tempat Pelelangan Ikan yang kurang Optimal? Oleh karena itu, masalah inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti masalah ini, dengan tujuan untuk mendeskripsikan kebijakan dalam optimalisasi TPI dan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan nelayan.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dan lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan. Sumber data dalam Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang terdiri dari pihak Dinas, pihak TPI dan para nelayan, dan sumber data sekunder yang terdiri dari dokumentasi dan arsip-arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan teknik analisa data kualitatif.

Setelah penelitian dilakukan, dari data yang telah disajikan dan dianalisis maka dapat dirumuskan bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah Keputusan Bupati nomor 04 tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 50 tahun 2000 tentang retribusi pasar grosir penyelenggaraan pelelangan ikan. Isi dari Keputusan tersebut adalah untuk kesejahteraan nelayan, untuk menyelenggarakan keputusan tersebut tersedia sumber daya manusia serta sarana dan pra sarana yang cukup. Dalam keputusan Bupati tersebut juga menjelaskan besarnya tarif retribusi mulai dari pungutan sampai pada penggunaannya. Mengenai pendapatan dan hasil tangkap ikan tidak bisa dipastikan karena selalu berubah-ubah, sebenarnya pendapatan nelayan tergantung dari hasil tangkap ikan, dan hasil tangkap ikan tergantung dari alat tangkap yang digunakan. Secara keseluruhan tergantung dari kualitas pendidikan nelayan, karena pendidikan bagi nelayan adalah modal bagaimana usaha nelayan untuk dapat meningkatkan pendapatan guna mencapai hidup yang sejahtera.

Dari penjelasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Kabupaten Lamongan dalam optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah Keputusan Bupati nomor 04 tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 50

tahun 2000 tentang retribusi pasar grosir penyelenggaraan pelelangan ikan. Dampak positif dari kebijakan ini terhadap kesejahteraan nelayan adalah dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan pendapatan. Sedangkan dampak negatifnya adalah apabila kebijakan ini tidak dilaksanakan dilapangan maka peningkatan kesejahteraan nelayan mengalami kesulitan. Namun, masalah yang masih terjadi adalah sebagian nelayan tidak menjual ikan ke TPI melainkan pada bakul. Hal ini disebabkan karena kualitas pendidikan nelayan yang masih rendah menyebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang keputusan Bupati tersebut. Oleh karena itu, peneliti memberi saran kepada Dinas dan TPI untuk memberikan bimbingan, penyuluhan atau pelatihan-pelatihan kepada nelayan secara rutin guna meningkatkan kualitas pendidikan nelayan, meningkatkan kesadaran dan pemahaman nelayan mengenai kebijakan Keputusan Bupati tersebut.